



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 5826-5833

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Implementasi Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka: Keteladanan, Etika, dan Sikap Profesional Guru di SDN 5 Langkai

Shicilia Agstaviani<sup>1</sup>, Alya Saputri<sup>2</sup>, Citra Rara Pebriani<sup>3</sup>, Dea Cantika<sup>4</sup>, Tesa Susanti<sup>5</sup>

Universitas Palangkaraya

[shicilia23@gmail.com](mailto:shicilia23@gmail.com), [alyamanissss099@gmail.com](mailto:alyamanissss099@gmail.com), [citrararap@gmail.com](mailto:citrararap@gmail.com), [deacantika0413@gmail.com](mailto:deacantika0413@gmail.com),  
[tesasusanti7761@gmail.com](mailto:tesasusanti7761@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis implementasi kode etik guru dalam konteks Kurikulum Merdeka di SDN 5 Langkai. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur bersama kepala sekolah dan guru kelas IV. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk pelaksanaan kode etik guru, kesesuaiannya dengan prinsip Kurikulum Merdeka, hambatan yang dihadapi, serta strategi sekolah dalam mengembangkan profesionalitas guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru telah berjalan melalui kegiatan evaluasi rutin setiap bulan, pembiasaan sikap profesional, serta penguatan tanggung jawab guru dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan, kemampuan, serta karakteristik siswa. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kode etik tidak hanya dipahami sebagai aturan moral, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengambil keputusan pedagogis di kelas. Meskipun demikian, pelaksanaan kode etik masih menghadapi beberapa hambatan, terutama keterbatasan sarana pembelajaran, perbedaan kesiapan guru dalam beradaptasi, dan kebutuhan pelatihan yang lebih berkelanjutan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah mengembangkan komunitas belajar, refleksi bulanan, diskusi antarguru, serta pendampingan internal. Strategi ini membantu guru saling berbagi pengalaman dan memperbaiki praktik pembelajaran. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa budaya sekolah yang terbuka menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi perilaku etis guru selama menjalankan proses pendidikan di seluruh kegiatan pembelajaran sekolah dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kode etik guru di SDN 5 Langkai berjalan selaras dengan tuntutan Kurikulum Merdeka karena menekankan profesionalitas, tanggung jawab, penghargaan terhadap keberagaman siswa, dan refleksi berkelanjutan. Namun, dukungan fasilitas, penguatan kompetensi, dan pelatihan terencana masih diperlukan agar pelaksanaannya semakin optimal.*

*Kata Kunci: Kode Etik Guru, Keteladanan, Profesionalisme, Kurikulum Merdeka, Sekolah Dasar*

### 1. Latar Belakang

Di berbagai penjuru dunia, profesi guru kerap disebut sebagai salah satu pekerjaan paling mulia sekaligus paling menantang. Setiap hari, jutaan guru masuk ke dalam kelas dan menghadapi kenyataan yang kompleks: peserta didik dengan latar belakang beragam, tuntutan kurikulum yang terus berkembang, serta harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas Pendidikan. Di tengah kompleksitas itu, muncul pertanyaan mendasar yang tidak selalu mudah dijawab, yakni apa yang sejatinya membedakan seorang guru yang baik dari yang sekedar hadir di depan kelas?.

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak semata-mata terletak pada seberapa luas penguasaan materi yang dimiliki seorang guru. Stronge (2018) menegaskan bahwa efektifitas guru mencakup dimensi yang lebih dalam, yaitu atribut personal seperti kepedulian, kejujuran, dan komitmen moral yang tidak kalah penting dibandingkan kompetensi pedagogis dalam menentukan hasil belajar peserta didik. Artinya, seorang guru bukan hanya pengajar ilmu, melainkan juga figure, yang secara langsung membentuk nilai dan karakter generasi penerus bangsa.

Di Indonesia, realitas ini tercermin dalam berbagai kebijakan Pendidikan yang menempatkan integritas dan etika guru sebagai fondasi utama profesi kependidikan. Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) yang dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memuat Sembilan butir yang mengatur tanggung jawab guru terhadap peserta didik, orang tua, masyarakat, rekan kerja, dan institusi Pendidikan. Dokumen ini bukan sekedar aturan

normative di atas kertas, melainkan kerangka identitas profesional yang seharusnya hidup dan dilakukan dalam keseharian seorang guru.

Relevansi kode etik tersebut semakin kuat Ketika dihadapkan pada transformasi besar dalam dunia Pendidikan Indonesia. Sejak tahun 2022, pemerintah melalui Kemendikbudristek menerapkan Kurikulum Merdeka secara nasional, sebuah pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan mengedepankan pengembangan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup enam dimensi karakter: beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif (Kemendikbudristek 2022). Dalam kerangka kurikulum seperti ini, guru tidak cukup hanya kompeten secara teknis. Ia juga dituntut menjadi model hidup bagi nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik.

Tuntutan tersebut bukan tanpa dasar ilmiah. Tomlinson (2017) menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu pilar Kurikulum Merdeka menuntut komitmen etis yang kuat dari seorang guru untuk tidak mendiskriminasi peserta didik berdasarkan perbedaan kemampuan, serta kreativitas tinggi dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna bagi semua. Lebih jauh lagi, Bandura (dalam Schunk & DiBenedetto, 2020) melalui teori kognitif sosialnya menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah dasar secara intensif membentuk perilaku dan nilai mereka melalui pengamatan terhadap figure otoritas di sekitar mereka, dan guru adalah figure otoritas paling dominan yang mereka temui setiap hari.

Penelitian-penelitian terkini memperkuat argument ini. Day dkk. (2020) dalam studi longitudinal tentang identitas profesional guru menemukan bahwa guru yang memiliki komitmen moral dan etis yang kuat menunjukkan ketahanan lebih tinggi dalam menghadapi perubahan kebijakan Pendidikan dan lebih tinggi dalam menghadapi perubahan kebijakan Pendidikan dan lebih konsisten dalam menjaga kualitas hubungan dengan peserta didik. Sementara itu, Roorda dkk. (2017) melalui meta-analisis terhadap 103 studi membuktikan bahwa hubungan afektif yang positif antara guru dan peserta didik berkorelasi signifikan dengan keterlibatan dan prestasi belajar, khususnya di jenjang sekolah dasar.

Di tingkat local, Sari dan Rahmat (2021) menemukan bahwa pemahaman guru terhadap kode etik profesi berkorelasi positif dengan kemampuan mereka menciptakan iklim kelas yang inklusif dan kondusif. Hidayat dkk (2023) pun mengidentifikasi bahwa guru yang menginternalisasi nilai-nilai kode etik cenderung lebih adaptif dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang mejadi tuntutan Kurikulum Merdeka.

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menelaah implementasi kode etik guru dalam konteks Kurikulum Merdeka, terutama di jejang sekolah dasar, masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menjadi persoalan nyata di lapangan: tuntutan normative kode etik belum tentu sejalan dengan praktik keseharian guru, khususnya Ketika mereka dihadapkan pada perubahan paradigma kurikulum yang belangsung cepat. SDN 5 Langkai sebagai salah satu sekolah dasar negeri yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka menjadi kontes yang relevan untuk mengkaji persoalan ini secara empiris.

Bertolak dari kondisi tersebut, peneliti ini bertujuan menganalisis implementasi kode etik guru, khususnya pada aspek keteladanan etika profesional, dan sikap dalam pembelajaran berdiferensiasi di SDN 5 Langkai dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Temuan penelitian ini diharapkan profesionalisme guru yang mengintegrasikan dimensi etika dengan tuntutan kurikulum berbasis karakter di Indonesia.

Kajian mengenai kode etik guru dalam Kurikulum Merdeka perlu diperluas karena perubahan kurikulum tidak hanya menyentuh perangkat ajar, tetapi juga cara guru memandang peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Dalam paradigma lama, guru sering diposisikan sebagai pusat informasi, sedangkan siswa menerima materi secara relatif seragam. Kurikulum Merdeka menggeser pola tersebut dengan memberi ruang lebih besar bagi kebutuhan, minat, kesiapan, dan karakter peserta didik. Pergeseran ini menuntut guru untuk memiliki kesadaran etis yang kuat, sebab keputusan pembelajaran yang dibuat guru akan memengaruhi kesempatan belajar setiap anak. Di sinilah kode etik menjadi pedoman penting agar kebebasan mengajar tidak berubah menjadi praktik yang tidak terarah.

Kode etik guru dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membimbing guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut mencakup tanggung jawab terhadap peserta didik, kejujuran akademik, keadilan dalam memperlakukan siswa, penghormatan terhadap keberagaman, serta komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi. Dalam konteks SDN 5 Langkai, implementasi kode etik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan harian guru di kelas. Cara guru menyapa siswa, memberi teguran, menyusun asesmen, menilai hasil belajar, dan merespons perbedaan kemampuan merupakan bagian nyata dari penerapan etika profesi. Dengan demikian, kode etik bukan hanya dibaca sebagai aturan formal, tetapi diwujudkan melalui tindakan pedagogis yang berulang setiap hari.

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan kode etik karena guru dituntut menghargai keunikan setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi, misalnya, tidak hanya membutuhkan keterampilan merancang variasi tugas, tetapi juga membutuhkan sikap adil dan empatik. Guru perlu menyadari bahwa siswa memiliki latar belakang keluarga, kemampuan akademik, gaya belajar, dan kesiapan emosional yang berbeda. Apabila guru memberikan perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan tersebut, maka pembelajaran dapat menjadi tidak adil bagi siswa tertentu. Oleh karena itu, diferensiasi menjadi bentuk konkret dari etika kepedulian dalam pembelajaran.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya evaluasi kode etik setiap bulan memperlihatkan bahwa sekolah telah memiliki mekanisme pengendalian profesional. Evaluasi rutin penting karena perilaku etis tidak cukup dibentuk melalui aturan, tetapi perlu dipelihara melalui refleksi bersama. Dalam forum evaluasi, guru dapat membahas pengalaman mengajar, kesulitan menghadapi siswa, cara membangun komunikasi dengan orang tua, serta strategi menyesuaikan pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini dapat membantu guru menyadari kelemahan praktiknya, memperbaiki keputusan pembelajaran, dan menjaga komitmen terhadap nilai-nilai profesi. Refleksi bulanan juga menunjukkan bahwa sekolah berusaha membangun budaya profesional yang terbuka, bukan sekadar menilai guru secara administratif.

Penerapan asesmen diagnostik menjadi salah satu temuan penting karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab etis guru dalam memahami kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik memungkinkan guru mengetahui kemampuan, kebutuhan, dan hambatan belajar sebelum merancang pembelajaran. Secara etis, langkah ini penting karena guru tidak boleh membuat keputusan pembelajaran berdasarkan dugaan semata. Dengan mengetahui kondisi siswa secara lebih akurat, guru dapat menyusun tujuan, materi, metode, dan bentuk evaluasi yang lebih sesuai. Jika asesmen diagnostik dilakukan secara konsisten, proses pembelajaran akan lebih inklusif karena siswa tidak dipaksa mengikuti pola yang sama tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka.

Namun, pelaksanaan kode etik dalam Kurikulum Merdeka tetap menghadapi hambatan. Keterbatasan sarana dapat mengurangi ruang kreativitas guru dalam menghadirkan pembelajaran yang variatif. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek, penggunaan media digital, atau aktivitas eksploratif membutuhkan dukungan alat, bahan, dan lingkungan belajar yang memadai. Ketika fasilitas terbatas, guru perlu bekerja lebih kreatif agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik tidak hanya bergantung pada niat baik guru, tetapi juga pada dukungan sistem sekolah. Guru yang beretika membutuhkan lingkungan kerja yang mendukung agar nilai profesional dapat diterjemahkan secara optimal dalam praktik.

Tantangan adaptasi juga menjadi masalah yang wajar dalam perubahan kurikulum. Tidak semua guru dapat langsung memahami istilah, perangkat, dan pendekatan baru dalam Kurikulum Merdeka. Sebagian guru mungkin masih terbiasa dengan pola pembelajaran yang lebih terpusat pada guru, sehingga membutuhkan waktu untuk beralih pada pembelajaran yang lebih fleksibel. Dalam hal ini, kode etik menuntut guru untuk terbuka terhadap perubahan dan bersedia belajar sepanjang hayat. Profesionalisme guru tidak berarti selalu mengetahui semua hal, tetapi bersedia memperbaiki diri, menerima masukan, dan menyesuaikan praktik pembelajaran dengan kebutuhan zaman.

Komunitas belajar yang dikembangkan sekolah menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan tersebut. Melalui komunitas belajar, guru dapat saling bertukar pengalaman, menyusun perangkat ajar, mendiskusikan hasil asesmen, dan mencari solusi atas persoalan kelas. Kolaborasi ini memperkuat implementasi kode etik karena guru tidak bekerja secara individual, melainkan dalam budaya kolejial yang saling mendukung. Etika profesi juga mencakup tanggung jawab terhadap rekan sejawat, sehingga kerja sama antarguru menjadi bagian dari praktik etis di sekolah. Dengan adanya komunitas belajar, guru dapat mengembangkan kompetensi pedagogis sekaligus memperkuat komitmen moral terhadap peserta didik.

Selain itu, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan kode etik berjalan selaras dengan Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah tidak hanya bertugas mengawasi administrasi, tetapi juga menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong terciptanya iklim sekolah yang etis. Dukungan kepala sekolah dapat terlihat dari penyediaan ruang refleksi, pemberian arahan, fasilitasi pelatihan, serta penguatan komunikasi antarguru. Apabila kepemimpinan sekolah bersifat terbuka dan partisipatif, guru akan lebih mudah mengembangkan inovasi tanpa takut disalahkan. Hal ini penting karena Kurikulum Merdeka membutuhkan keberanian guru untuk mencoba, mengevaluasi, dan memperbaiki strategi pembelajaran.

Dengan demikian, implementasi kode etik guru di SDN 5 Langkai dalam konteks Kurikulum Merdeka dapat dipahami sebagai proses yang bersifat moral, pedagogis, dan institusional. Guru tidak hanya menjalankan aturan profesi, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, refleksi, dan kolaborasi. Kendala sarana dan adaptasi memang masih menjadi tantangan, tetapi keberadaan evaluasi bulanan

dan komunitas belajar menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan. Jika dukungan fasilitas, pelatihan, dan kepemimpinan sekolah terus diperkuat, penerapan kode etik dapat menjadi fondasi penting bagi pembelajaran yang lebih adil, humanis, dan bermakna bagi peserta didik.

Lebih jauh, penelitian ini memberi pemahaman bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak cukup diukur dari kelengkapan modul ajar atau variasi metode pembelajaran. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh integritas guru dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Ketika guru menilai siswa secara jujur, menghargai perbedaan, menjaga komunikasi yang santun, dan terus merefleksikan praktiknya, maka kode etik benar-benar hidup dalam budaya sekolah. Oleh sebab itu, penguatan etika profesi perlu ditempatkan sebagai agenda utama pengembangan guru, sejajar dengan peningkatan kemampuan teknis mengajar. Inilah dasar penting bagi mutu pendidikan dasar yang berkelanjutan, adil, dan kontekstual nasional.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bermaksud menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan (Moleong 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur pada tanggal 22 Mei 2026 di SDN 5 Langkai.

Subjek penelitian terdiri atas dua informen utama, yaitu (1) Ida Susanti, S.Pd., selaku kepala sekolah SDN 5 Langkai, dan (2) Uma Parida, S.Pd., selaku guru kelas IV SDN 5 Langkai. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara yang terdiri atas dua bagian, yaitu pertanyaan tertutup, (closed-ended) untuk mengidentifikasi kondisi factual dan pertanyaan terbuka (open-ended) untuk menggali pengalaman dan persepsi informan secara lebih mendalam.

Data dianalisis menggunakan Teknik analisis tematik Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga tahap, yaitu (1) kondensasi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data, (2) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel, serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 5 Langkai Ibu Ida Susanti, S.Pd., sosialisasi kode etik guru kepada seluruh guru di sekolah telah dilaksanakan dengan baik. Lebih dari itu, evaluasi terhadap penerapan kode etik dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi kendala dan hal-hal yang belum optimal. Kepala sekolah menyatakan bahwa kode etik menjadi pedoman dalam setiap kegiatan evaluasi dan workshop yang dilakukan.

Kepala sekolah mengkonfirmasi bahwa sekolah telah memiliki program pelatihan Kurikulum Merdeka yang berjalan melalui Komunitas Belajar (KomBel) dengan minimal satu kali per-minggu hingga maksimal satu kali per-bulan. Guru kelas IV, Ibu Uma Parida, S.Pd., juga menyatakan telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa, serta melakukan asesmen diagnostic secara rutin di awal tahun ajaran. Ibu Uma Parida, S.Pd., menyebutkan bahwa komunitas belajar di sekolah aktif dilakukan secara sharing tentang kondisi siswa yang menunjukkan orintasi pada kebutuhan peserta didik sebagaimana diamanatkan Kurikulum Merdeka.

Mengenai aspek kode etik yang paling menantang, kepala sekolah menyebutkan yaitu terkait tentang pembinaan karakter, contohnya bertanggung jawab dan disiplin. Hal ini mengidentifikasi kesadaran bahwa keteladanan bukan sekedar slogan atau kata-kata, melainkan sebuah praktik yang harus dijalankan secara konsisten dan memerlukan bimbingan yang berkeseluruhan agar proses pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik.

Terdapat dua hambatan utama yang teridentifikasi dari hasil wawancara. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Kepala sekolah mengakui bahwa pengembangan sarana dan prasarana masih sangat minim, termasuk ketersediaan buku Kurikulum Merdeka dan media digital (seperti televisi yang disediakan oleh pemerintah hanya satu di sekolah tersebut serta penggunaannya yang dilakukan secara terjadwal untuk setiap kelas). Keterbatasan anggaran menyebabkan pengadaan dilakukan secara bertahap.

Kedua, tantangan adaptasi terhadap hal-hal baru. Guru kelas IV menyatakan bahwa memahami dan menerapkan hal-hal baru dalam Kurikulum Merdeka. Hambatan sinyal internet juga disebutkan sebagai kendala dalam pemanfaatan sumber belajar digital. Sebagai solusi, sekolah menerapkan pendekatan step-by-step bertahap

namun konsisten. Refleksi dan evaluasi bulanan, workshop, serta komunitas belajar menjadi strategi utama dalam meningkatkan kompetensi professional guru.

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah pengakuan guru kelas IV bahwa kode etik guru (khususnya kejujuran profesional dan membimbing peserta didik seutuhnya) sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka. Guru tersebut juga menekankan bahwa peserta didik di era sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga diperlukan beragam model dan metode pembelajaran yang sesuai dan menarik.



**Gambar 1.** *Bagan Kode Etik Guru SDN 5 Langkai*



**Gambar 2.** *Hasil Wawancara Kepala Sekolah*



**Gambar 3.** *Hasil Wawancara Guru Kelas IV*

Gambar diatas merupakan dokumentasi began kode etik guru yang dipajang didalam ruang guru SDN 5 Langkai dan proses wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala sekolah dan guru kelas IV SDN 5 Langkai. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kode etik guru menjadi pedoman utama dalam keberlangsungan keberhasilan keprofesional guru terutama dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, serta wawancara yang dilakukan guna mengumpulkan data kualitatif secara langsung, yang bertujuan menggali informasi secara mendalam terkait implementasi kode etik guru dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi dan Evaluasi Kode Etik Guru**

Hasil penelitian di SDN 5 Langkai menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru berlangsung secara konsisten dan terstruktur, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan operasional. Komitmen dalam pembinaan profesionalisme ini tercermin dari kebijakan kepala sekolah yang secara rutin mensosialisasikan dan mengevaluasi penerapan kode etik setiap per-minggu atau per-bulan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Stone (2018) yang menekankan bahwa efektifitas guru tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi, melainkan juga oleh dimensi etika dan karakter yang berwujud dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, evaluasi berkala ini selaras dengan studi

Day dkk. (2020) yang membuktikan bahwa guru dengan komitmen moral dan etis yang kuat menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi dalam menghadapi dinamika perubahan kebijakan Pendidikan.

## 2. Keteladanan dan Hubungan Afektif Guru-Peserta Didik

Dalam aspek keteladanan, guru kelas IV SDN 5 Langkai melakukan pemberian motivasi belajar secara konsisten dan menciptakan kelas yang menyenangkan. Pendekatan ini relevan dengan teori kognitif sosial Bandura (dalam Schunk & DiBenedetto, 2020) yang menekankan bahwa peserta didik usia sekolah dasar membentuk nilai dan perilaku melalui observasi terhadap figure otoritas. Dengan demikian, keteladanan guru bukan sekedar pemenuhan aspek normatif, melainkan sebuah mekanisme psikologis yang memengaruhi pembentukan karakter peserta didik secara langsung. Lebih lanjut, kualitas hubungan positif yang dibangun melalui sikap peduli dan motivasi ini sejalan dengan temuan Roorda dkk. (2017) bahwa hubungan afektif yang positif antara guru dan peserta didik berkorelasi signifikan terhadap peningkatan keterlibatan serta prestasi belajar di jenjang sekolah dasar.

## 3. Internalisasi Kode Etik dalam Kurikulum Merdeka

Pada konteks implementasi Kurikulum Merdeka, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostic oleh guru kelas IV merepresentasikan internalisasi nilai kode etik, khususnya prinsip keberpihakan pada peserta didik. Praktik ini sesuai dengan tesis Tomlinson (2017) bahwa pembelajaran berdiferensiasi memnuntut komitmen etis guru untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta didik tanpa diskriminasi. Kesadaran guru mengenai pentingnya variasi model dan metode pembelajaran menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap filosofi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada keberagaman kebutuhan belajar. Temuan ini sekaligus memperkuat argument Hidayat dkk. (2023) bahwa guru yang menginternalisasi nilai-nilai kode etik cenderung lebih adaptif dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*).

## 4. Komunitas Belajar sebagai Wadah Penguatan Kolektif

Aktivitas Komunitas Belajar (KomBel) yang dinamis di SDN 5 Langkai menjadi salah satu strategi dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional guru. Diskusi rutin antarguru mengenai perkembangan peserta didik mencerminkan penerapan butir kode etik terkait tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan institusi. Hal ini diperkuat oleh Sari dan Rahmat (2021) yang menemukan bahwa pemahan guru terhadap kode etik profesi berkorelasi positif dengan kemampuan menciptakan iklim kelas yang inklusif dan kondusif. Melalui temuan ini KomBel terbukti tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengembangan kapasitas teknis-pedagogis, melainkan juga sebagai mekanisme penguatan etika profesi secara kolektif.

## 5. Analisis Hambatan dan Solusi Penguatan

Hambatan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini meliputi keterbatasan sarana dan prasarana dan tantangan adaptasi terhadap inovasi Pendidikan. Keterbatasan infrastruktur digital (seperti kuantitas perangkat televisi yang terbatas dan ketidakstabilan sinyal internet) berpotensi menghambat optimalisasi pembelajaran berbasis teknologi yang menjadi karakteristik Kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek (2022) sendiri telah menegaskan bahwa dukungan saran dan prasarana merupakan prasyarat esensial dalam keberhasilan implementasi kurikulum secara menyeluruh.

Namun demikian, kendala tersebut tidak menyeluruh menjadi penghambat bagi guru untuk tetap mempelajari dan menerapkan hal-hal baru. Sikap adaptasi ini merepresentasikan nilai profesionalisme tingkat tinggi, dimana pengembangan diri dipandang sebagai tanggung jawab profesi yang berkelanjutan. Strategi bertahap (*step-by-step*) yang diterapkan oleh pihak sekolah dalam mengatasi keterbatasan anggaran tersebut menunjukkan resiliensi institusional yang dapat dijadikan model tata Kelola perubahan bagi sekolah dasar negeri lainnya yang menghadapi tantangan serupa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru di SDN 5 Langkai telah berjalan melalui sosialisasi, evaluasi rutin, komunitas belajar, serta penerapan prinsip Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa kode etik tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga dijadikan pedoman dalam membangun profesionalisme guru. Adanya bagan kode etik yang dipajang di ruang guru menjadi simbol bahwa sekolah berusaha menghadirkan nilai etis dalam lingkungan kerja guru. Namun, keberadaan simbol

tersebut perlu diperkuat dengan praktik nyata, seperti keteladanan, kejujuran profesional, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kebutuhan peserta didik.

Evaluasi kode etik yang dilakukan setiap bulan menunjukkan adanya kesadaran sekolah untuk menjaga mutu perilaku profesional guru secara berkelanjutan. Evaluasi rutin penting karena pelaksanaan kode etik tidak cukup hanya melalui sosialisasi awal, melainkan harus dipantau dan direfleksikan secara terus-menerus. Melalui evaluasi tersebut, kepala sekolah dan guru dapat mengidentifikasi kendala yang muncul, menilai aspek yang belum optimal, serta menentukan langkah perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pemimpin pembelajaran yang tidak hanya mengawasi administrasi, tetapi juga membina etika dan kinerja guru.

Temuan mengenai pelaksanaan komunitas belajar juga menunjukkan bahwa SDN 5 Langkai memiliki strategi pengembangan profesional yang cukup baik. Komunitas belajar memberi ruang bagi guru untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi terhadap permasalahan pembelajaran. Kegiatan sharing tentang kondisi siswa mencerminkan bahwa guru tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga berupaya memahami kebutuhan peserta didik. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, hal ini sangat penting karena pembelajaran harus berpihak pada murid. Guru perlu mengenali kemampuan, minat, gaya belajar, dan hambatan siswa agar pembelajaran dapat disusun secara lebih tepat.

Penerapan pembelajaran berdiferensiasi oleh guru kelas IV menunjukkan bahwa kode etik guru sejalan dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk memperlakukan siswa secara adil berdasarkan kebutuhan masing-masing, bukan memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama. Guru yang menerapkan diferensiasi menunjukkan sikap profesional karena berusaha memberi kesempatan belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selain itu, asesmen diagnostik yang dilakukan pada awal tahun ajaran menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi awal siswa. Dengan asesmen ini, guru dapat merancang strategi pembelajaran berdasarkan data, bukan sekadar dugaan.

Aspek kode etik yang dinilai paling menantang adalah pembinaan karakter, terutama tanggung jawab dan disiplin. Temuan ini menunjukkan bahwa keteladanan guru menjadi faktor utama dalam pendidikan karakter. Guru tidak cukup hanya menasihati siswa agar disiplin dan bertanggung jawab, tetapi harus menunjukkan perilaku tersebut dalam tindakan sehari-hari. Ketepatan waktu, konsistensi dalam aturan kelas, kejujuran dalam menilai, dan kesabaran dalam membimbing siswa merupakan bentuk nyata keteladanan. Apabila guru mampu menjadi contoh yang baik, siswa akan lebih mudah memahami nilai karakter karena mereka melihat langsung penerapannya di sekolah.

Meskipun implementasi kode etik telah berjalan, penelitian ini menemukan hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana. Minimnya buku Kurikulum Merdeka, terbatasnya media digital, serta penggunaan televisi yang harus dijadwalkan untuk setiap kelas menunjukkan bahwa fasilitas belajar belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pembelajaran. Hambatan ini dapat memengaruhi kreativitas guru dalam mengembangkan metode belajar yang menarik. Kurikulum Merdeka membutuhkan media yang beragam agar pembelajaran lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena itu, keterbatasan sarana perlu diatasi secara bertahap melalui pengadaan, pemanfaatan media sederhana, dan kerja sama sekolah dengan pihak terkait.

Hambatan lain adalah adaptasi guru terhadap hal-hal baru dalam Kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum menuntut guru memahami konsep baru, seperti asesmen diagnostik, pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta penggunaan sumber belajar digital. Tidak semua guru dapat langsung menyesuaikan diri, sehingga diperlukan pendampingan yang konsisten. Pendekatan step-by-step yang dilakukan sekolah merupakan strategi yang tepat karena perubahan profesional membutuhkan proses bertahap. Workshop, refleksi bulanan, dan komunitas belajar dapat membantu guru meningkatkan pemahaman sekaligus mengurangi kebingungan dalam menerapkan kebijakan baru. Proses ini juga memperkuat rasa percaya diri guru untuk mencoba strategi pembelajaran yang lebih kreatif, adaptif, dan sesuai kondisi kelas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru di SDN 5 Langkai telah mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kode etik menjadi dasar moral bagi guru dalam membimbing siswa, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan asesmen, dan membangun hubungan profesional. Namun, keberhasilan implementasi tersebut masih membutuhkan dukungan fasilitas, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan budaya refleksi. Dengan adanya komitmen kepala sekolah dan guru, kode etik dapat menjadi landasan

penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih humanis, adil, disiplin, dan berpihak pada perkembangan peserta didik secara optimal dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kode etik guru di SDN 5 Langkai berjalan secara bertahap dan selaras dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas IV, terdapat empat temuan utama. Pertama, sekolah telah mensosialisasikan dan mengevaluasi kode etik guru secara rutin setiap bulan, menjadikannya sebagai pedoman operasional dalam kegiatan pembelajaran dan pembinaan profesional. Kedua, guru telah mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka dan secara aktif menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta asesmen diagnostik sebagai wujud keberpihakan pada kebutuhan individual peserta didik. Ketiga, hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana serta tantangan adaptasi terhadap pendekatan pembelajaran baru, yang diatasi melalui strategi bertahap namun konsisten. Keempat, Komunitas Belajar (KomBel), refleksi bulanan, dan workshop menjadi strategi utama dalam meningkatkan kompetensi profesional guru secara berkelanjutan. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pengembangan model pembinaan profesionalisme guru di Indonesia. Integrasi dimensi etika profesi dengan tuntutan kurikulum berbasis karakter perlu mendapat perhatian lebih dalam program pelatihan guru, terutama dalam konteks Kurikulum Merdeka yang menempatkan Profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan utama. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan guru guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara implementasi kode etik guru dan keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar. Selain itu, diperlukan dukungan pemerintah yang lebih konkret dalam hal penyediaan infrastruktur dan penguatan program pembinaan guru yang mengintegrasikan dimensi etika profesi secara sistematis dan berkelanjutan.

#### Referensi

1. Day, C., Sammons, P., & Stobart, G. (2020). Teachers matter. *Professional Development in Education*, 46(4).
2. Hidayat, R., dkk. (2023). Profesionalisme guru dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*, 7(2).
3. Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka*.
4. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
5. Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
6. Roorda, D. L., et al. (2017). Affective teacher–student relationships and students’ engagement. *Review of Educational Research*, 87(6), 1–35.
7. Sari, R. P., & Rahmat, A. (2021). Implementasi kode etik guru dalam pembentukan iklim kelas. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1).
8. Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). Motivation and social cognitive theory. *Contemporary Educational Psychology*, 60.
9. Stronge, J. H. (2018). *Qualities of Effective Teachers* (3rd ed.). ASCD.
10. Tomlinson, C. A. (2017). *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms* (3rd ed.). ASCD.
11. Muzammil, M., & Bahrian, B. I. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melalui Keteladanan Guru. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 159-167.
12. Naibaho, D., & Simanjuntak, V. (2025). Penerapan Kode Etik Guru Pak Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(1), 650-657.
13. Tambunan, R. B., & Simamora, L. R. T. (2026). Penguatan Profesionalisme Guru dalam Era Transformasi Pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 1656-1663.
14. KHOFIFAH, N. (2024). *KINERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI PADA PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA MORAL DAN AKHLAK PESERTA DIDIK KELAS X DI SMA NEGERI 10 KOTA BENGKULU* (Doctoral dissertation, UIN FAS Bengkulu).
15. Asyha, A. F., Astuti, Y., Nurona, R. R. A., & Diana, N. (2025). Analisis implementasi etika profesi dan kode etik guru dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Niara*, 18(1), 249-257.